

BAB IV

Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Sengketa di Laut China Selatan Era Kepemimpinan Obama

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kebijakan dari Amerika Serikat terhadap sengketa di Laut China Selatan dengan mengamplifikasikan dua kerangka berpikir yang penulis jadikan acuan sebagai sudut pandang penyelesaian masalah yaitu; diplomasi politik dan diplomasi keamanan. Dari dua kerangka berpikir yang penulis gunakan nantinya juga akan dikaitkan dengan dua poin hipotesa yang menjadi praduga penulis yaitu; melakukan kebijakan diplomasi politik melalui ketergabungan Amerika Serikat dalam agenda forum internasional dan organisasi regional ASEAN dan dalam kebijakan diplomasi keamanan Amerika Serikat melakukan kerjasama dalam bentuk bantuan militer terhadap Filipina dan Vietnam terkait bantuan persenjataan maupun bantuan pasukan militer oleh Amerika Serikat.

Sehubungan dengan isu konflik Laut China Selatan yang telah melibatkan setidaknya enam negara pengklaim serta keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya, beberapa kebijakan sebagai upaya dalam proses penyelesaian masalah setidaknya sudah dilakukan meskipun belum menemukan titik temu berupa solusi *final* yang bisa dibakukan. Seperti yang terjadi dalam rentang waktu kepemimpinan presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama.

Sejak memimpin Amerika Serikat pada tahun 2009 sampai dengan 2017 menggantikan George W. Bush sebagai presiden terdahulu, Obama telah melakukan beberapa tindakan kebijakan upaya

penyelesaian konflik yang serupa dengan yang pernah Bush ataupun Clinton lakukan sebelumnya. Poros terbaru dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk kawasan Asia-Pasifik mengakui realitas geopolitik baru dengan pusat ekonomi global yang telah bergeser, dan kawasan ini –Asia-Pasifik– sedang berjuang untuk keseimbangan di tengah kekuatan yang bersaing (Steffens, 2013, p. 88). Kepentingan Amerika Serikat yang meningkat di kawasan ini ialah hasil dari penyeimbangan ulang administrasi Asia-Pasifik oleh Obama yaitu, pergeseran kebijakan yang telah diarahkan terutama menuju Asia Tenggara sejak 2009 (Steffens, 2013, p. 99). Selaras juga dengan kebijakan kepemimpinan Obama yang berniat menguatkan eksistensi Amerika Serikat di kawasan Asia.

Upaya pembangunan mitra kerja terus dilakukan sejalan dengan apa yang telah terjalin sebelumnya, Obama berupaya untuk mengukuhkan keberadaan Amerika Serikat dalam lingkungan konflik dengan cara menjalin kerjasama bersama negara-negara disekitar kawasan, maupun memperdalam kerjasama yang sudah ada. Amerika Serikat juga terus memperkuat prinsip-prinsip utama, yaitu;

"Kebutuhan untuk penyelesaian sengketa yang damai, kebebasan navigasi, dan penolakan terhadap ancaman, atau penggunaan, kekuatan atau paksaan ekonomi untuk menyelesaikan perselisihan." (Steffens, 2013, p. 100)

Adapun beberapa bentuk kebijakan yang dilakukan Obama melalui diplomasi politik maupun diplomasi keamanan adalah sebagai berikut;

A. Diplomasi Politik

Pada dasarnya diplomasi politik mengacu kepada tujuan mempererat hubungan antara negara sekutu, memelihara hubungan dengan negara-negara sehaluan dan menetralsir negara yang memusuhi, serta membina atau bahkan mengumpulkan persahabatan baru melalui negosiasi yang bermanfaat karena tujuan akan lebih mudah dicapai bersama pihak yang memiliki kesamaan kepentingan didalamnya (Roy, 1995, p. 6). Diplomasi ini dapat ditandai dengan munculnya kerjasama secara bilateral diantara kedua negara yang bersangkutan maupun secara multilateral dengan penggabungan kemitraan dalam suatu golongan atau bisa jadi berbentuk organisasi dan atau sebuah forum tertentu. Selain itu diplomasi politik berkaitan erat dengan hubungan kerjasama antar negara atau pihak tertentu dalam lingkup dimana pihak-pihak ini memiliki kepentingan yang serupa, dan berkenaan dengan adanya kecenderungan memengaruhi suatu kondisi ataupun sudut pandang yang sebelumnya sudah ada, sehingga hal ini mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap bentuk penyelesaian ataupun tindakan dan respon yang berbeda.

Sebagai kebijakan melalui diplomasi politiknya, Amerika Serikat telah membangun beberapa koneksi kerjasama dengan mitra wicara yang mampu membuatnya terhubung dengan permasalahan sengketa. Hal ini ditandai dengan munculnya hubungan multilateral yang Amerika Serikat bangun dengan salah satu organisasi regional terdekat dengan kawasan sengketa, yaitu ASEAN. Kebijakan ini juga kemudian menjadikan bentuk kebijakan yang membedakan Obama dengan dua presiden sebelumnya. Melalui kerjasama bersama organisasi regional ini pula, Obama turut menyinggung desakan penyelesaian sengketa, serta sedikit banyak memberikan opini Amerika Seri-

kat terhadap kondisi kawasan, serta dampak-dampaknya dengan menyisipkan kepentingannya disana.

Dalam menjalankan diplomasi politiknya Amerika Serikat melakukan kerjasama multilateral dengan organisasi internasional maupun regional dan forum-forum internasional tertentu, diantaranya; ASEAN, ASEAN Summit, ASEAN *Regional Forum*, ASEAN-US Summit dan lain-lain.

a. Organisasi Internasional

Sebagai bentuk kerjasama multilateral yang nyata, Amerika Serikat telah menjalin banyak kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dalam berbagai skala. Bahkan dalam beberapa organisasi internasional, Amerika Serikat mencatatkan diri sebagai *founding* ataupun menduduki kursi dewan khusus tertentu. hal ini juga terjadi pada upayanya Amerika Serikat dalam membangun kerjasama multilateral dengan organisasi internasional terkait konflik di Laut China Selatan. Amerika Serikat setidaknya telah menjalin kemitraan yang mumpuni dengan organisasi-organisasi internasional yang berada dekat ataupun beberapa negara anggotanya merupakan negara pengkalim, terlebih lagi bersama oraganisasi regional terdekat. Organisasi internasional yang menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian konflik ini adalah;

1. ASEAN (*Assosiation of South East Asia Nation*)

Sebagai organisasi regional yang terdekat dengan kawasan sengketa serta keterlibatan anggotanya dalam sengketa, ASEAN menjadi pihak yang paling berperan penting dalam pengadaan forum maupun pihak yang berpengaruh dalam

proses pengambilan kebijakan pada konflik Laut China Selatan. Deklarasi ASEAN perihal Laut China Selatan dikeluarkan pertama kali pada tahun 1992, pernyataan ini ditandatangani oleh enam anggota ASEAN pada saat itu, yakni; Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam (Simon S. W., 2012, p. 1002). Isi dari deklarasi ini ialah dengan mendukung pembentukan *Joint for Seismic Undertaking (JMSU)* antara China dan Filipina. JMSU merupakan suatu kesepakatan di antara ketiganya – ASEAN, China, dan Filipina– untuk mengeksplorasi potensi sumber daya dasar laut di beberapa wilayah klaim yang tumpang tindih. Namun, deklarasi ini berakhir pada tahun 2008 dengan tanpa adanya hasil yang dipublikasikan (Simon S. W., 2012, p. 997).

Amerika Serikat dan ASEAN sendiri memulai hubungannya sebagai mitra wicara sejak 1977 dan berlanjut dengan ditandatanganinya *Treaty of Amity and Coopertion (TAC)* pada 2009 serta penempatan Duta Besar Amerika Serikat khusus untuk ASEAN pada 2011 (EAST ASIA SUMMIT: Hubungan Kemitraan ASEAN-EAST ASIA SUMMIT, 2016). Pertemuan pemimpin ASEAN dan Amerika Serikat pada 2010 juga telah meibatkan pembahasan seputar sengketa, dimana Obama dan para pemimpin ASEAN juga sepakat tentang pentingnya upaya penyelesaian sengketa secara damai, kebebasan navigasi, stabilitas regional, dan penghormatan terhadap

hukum internasional (The White House President Barack Obama, 2010). Kerjasama ini juga didukung oleh hubungan baik antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN lainnya, pada masa kepemimpinana Obama, Washington kemudian melibatkan diri dalam beberapa forum penting yang membahas upaya penyelesaian konflik di kawasan Laut China Selatan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam forum milik ASEAN inilah yang menjadi jembatan sekaligus wadah kerjasama keduanya. Karena melalui pertemuan forum yang menjadi agenda kegiatan ASEAN kemudian Amerika Serikat mampu memberikan kontrobusinya terkait isu-isu yang menjadi topik pembahasan agenda termasuk isu sengketa Laut China Selatan.

Pada salah satu agenda forum yang menjadi perantara antara Amerika Serikat dengan anggota ASEAN dan pihak-pihak sengketa misalnya, Hilary Clinton yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan pidatonya;

“Amerika Serikat, seperti setiap negara lain, memiliki kepentingan nasional dalam kebebasan navigasi, membuka akses menuju kesepakatan maritim Asia, dan penghormatan terhadap hukum internasional di Laut China Selatan. Kami berbagi minat ini tidak hanya dengan anggota ASEAN dan peserta ASEAN Forum Regional saja, tetapi dengan negara maritim lainnya dan komunitas inter-

nasional yang lebih luas.” (Simon S. , 2011, pp. 55-57).

Dalam pidato tersebut Hilary setidaknya menyinggung perihal kepentingan umum maritim serta sindiran terhadap keberlangsungan sengketa, sebab Hillary mengartikulasikan apa yang dia yakini sebagai konsensus diantara sebagian besar kekuatan maritim dunia (Simon S. , 2011, p. 1002).

Selain itu, Amerika Serikat juga berkali-kali menyampaikan usulannya terhadap peranan ASEAN sendiri dalam upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Dimana Amerika Serikat memberikan masukan dan dorongan besar kepada ASEAN selaku organisasi regional terdekat dan yang paling berpotensi menengahi permasalahan ini serta menjadi wadah yang lebih efektif lagi dalam memecahkan jalan penyelesaian. Amerika Serikat beranggapan bahwa ASEAN mampu menjadi wadah negosiasi multilateral yang mumpuni. Bahkan dalam beberapa pidatonya terkait konflik di Laut China Selatan, Amerika Serikat menyebutkan ASEAN sebagai salah satu dari langkah harapan agar sengketa berkepanjangan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui perundingan damai.

Dalam sebuah wawancara, seorang analis kebijakan strategis Amerika Serikat untuk Asia dari lembaga Carnegie Endowment for International Peace, Douglas Paal mengatakan bahwa;

“Amerika Serikat tidak ingin menjadi menjadi pihak ketiga, karena tidak mem-

iliki kepentingan apapun dalam sengketa di Laut China Selatan; kecuali menjaga hak-hak navigasinya serta penerapan aturan hukum yang terkait. Namun demikian, ASEAN dapat menjadi sumber pemersatu untuk menghadapi tekanan negara tertentu –yang mungkin saja dilancarkan secara individual oleh China atau pihak-pihak lain” (Sherlita, 2011).

Pernyataan ini juga kembali ditegaskan oleh presiden Amerika Serikat, dalam pidatonya pada agenda forum ASEAN pada September 2016 lalu di Vientiane, Laos. Presiden Obama yang saat itu menjadi perwakilan Amerika Serikat dalam menyampaikan pidatonya menekankan bahwa, ASEAN merupakan mitra kerjasama yang menjadi kunci bagi Amerika Serikat sebagai penyeimbang hubungan negaranya dengan kawasan di Asia¹⁴.

Selain membangun mitra kerjasamanya dengan ASEAN, Amerika Serikat juga kemudian turut menjalin kemitraan dengan forum-forum internasional milik organisasi regional kawasan Asia Tenggara ini.

b. Forum Internasional

Menjadi bagian dalam setiap organisasi internasional yang ada, forum internasional biasanya berisikan kegiatan agenda dari organisasi tertentu dengan peserta agenda yang juga berasal dari keanggotaan organisasi atau sengaja mengundang

¹⁴ Asean Summit: Obama concerned over South China Sea row, The Star Online, on 8 September 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=rbIRYkFQzXM>, minutes 00:1:18.

pihak terkait lainnya. Agenda forum internasional biasanya akan membahas berbagai isu-isu yang terjadi seputar, keamanan, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Amerika Serikat pada kesempatan ini juga menggunakan upaya kerjasama multilateralnya dengan ASEAN dalam membangun suara melalui forum-forum internasional yang sempat dihadapinya, diantaranya; *ASEAN Regional Forum*, *ASEAN Summit*, *ASEAN-US Summit*, dan lain-lainnya.

1. ARF (ASEAN *Regional Forum*)

Pada dasarnya agenda ARF merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dari ARF. ARF sendiri beranggotakan kesepuluh negara ASEAN serta beberapa negara yang menjadi mitra wicaranya, diantaranya adalah Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan beberapa negara lainnya. Dalam agendanya, ARF akan membahas isu politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan isu non-tradisional lainnya (KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA).

Dalam keterkaitannya, Amerika Serikat telah menjadikan ARF sebagai salah satu sarana bagi upaya multilateralnya dalam hal penyelesaian sengketa di Laut

China Selatan bersama dengan anggota forum yang lain. Bulan Juli 2010, pemerintahan Obama memutuskan untuk memainkan peran utama dalam mempromosikan resolusi dari Kepulauan Spratly pada agenda ARF, sembari meletakkan penanda bahwa stabilitas Laut China Selatan untuk perdagangan maritim merupakan kepentingan Amerika Serikat yang signifikan (Simon S. W., 2012, p. 1002). Amerika Serikat mendukung inisiatif ASEAN sehubungan dengan kesepakatan CoC (*Code of Conduct*) maupun DoC (*Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea*). Serta dalam ARF pada bulan Juli 2011, Menteri Clinton menegaskan kembali perlunya partisipasi ASEAN serta strategi Amerika Serikat dalam memandang bagaimana isu-isu tersebut mampu dikelola (Simon S. W., 2012, p. 1004). Dalam pidatonya, Hillary Clinton menyampaikan,

“Amerika Serikat, seperti setiap negara lain, memiliki kepentingan nasional dalam kebebasan navigasi, membuka akses menuju kesepakatan maritim Asia, dan penghormatan terhadap hukum internasional di Laut China Selatan. Kami berbagi minat ini tidak hanya dengan anggota ASEAN dan peserta ASEAN Forum Regional saja, tetapi dengan negara maritim lainnya dan komunitas internasional yang lebih luas.” (Simon S. , 2011, pp. 55-57).

2. ASEAN Summit

Salah satu forum pertemuan terbesar milik ASEAN yang telah menghasilkan banyak kebijakan, dan beranggotakan pimpinan-pimpinan negara ASEAN dengan agenda pertemuan puncak yang membahas perihal aspek-aspek krusial. ASEAN Summit sudah menjadi agenda yang rutin dilakukan oleh kongres ASEAN dengan menjadikan isu-isu terkait anggotanya sebagai topik agenda. Setidaknya sudah kurang lebih 19 pertemuan agenda ASEAN Summit yang telah dilangsungkan sejak forum ini dilan-sanakan pada Februari 1976 lalu di Indo-nesia.

Sebagai mitra wicara bagi ASEAN dan memiliki posisi yang mampu menun-jang kehadirannya dalam forum, Amerika Serikat telah mengupayakan beberapa kesempatannya untuk membahas perihal isu-isu kerjasama maupun perihal kawa-san dibeberapa pertemuan. Pada kesemp-atan agenda tersebut, Hillary Clinton selaku tamu khusus yang diundang oleh ketua ASEAN juga mendesak para pem-impin untuk mengadopsi agenda aktif un-tuk menyelesaikan sengketa maritim ter-hadap bentuk upaya penyelesaian konflik yang ada (CSEA, 2010, p. 353). Agenda aktif yang dimaksud adalah termasuk pa-da pembahasan prioritas dibidang ker-jasama ekonomi, pendidikan, energi, pe-nanganan bencana, dan pencegahan avian flu (EAST ASIA SUMMIT: Hubungan Kemitraan ASEAN-EAST ASIA SUM-

MIT, 2016). Dalam hal ini, Amerika Serikat menggarisbawahi bahwa tingkat kestabilan kawasan mampu secara signifikan memberikan pengaruh terhadap berlangsungnya kerjasama yang dimaksud, terutama pada poin kerjasama ekonomi.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina, Harry Thomas mendukung pernyataan tentang Laut China Selatan yang dibahas pada ASEAN Summit pada tanggal 18 Mei 2011, dengan menyatakan bahwa konsultasi ASEAN sangat tepat sebelum pertemuan dengan China mengenai perselisihan teritorial karena dalam penyelesaian konflik perlu adanya keterlibatan dari semua penuntut yang duduk di meja perundingan (Simon S. W., 2012, pp. 1003-4). Pertemuan ASEAN Summit pada September 2016 yang mana merupakan kunjungan terakhir Obama dalam agenda ASEAN Summit dan Asia sebagai presiden Amerika Serikat juga menjadi kesempatan bagi perwakilan Washington untuk menyampaikan pidatonya terkait isu sengketa ini. Dalam pidatonya Obama menyatakan bahwa;

“Sehubungan dengan masalah maritimes akan bekerja keras memastikan bahwa perselisihan diselesaikan dengan damai termasuk di Laut China Selatan, putusan arbitrase yang penting pada bulan Juli yang mengikat membantu memperjelas hak-hak maritim di wilayah yang saya akui ini menimbulkan ketegangan, tetapi saya juga berharap untuk membahas bagaimana kita dapat secara kon-

*struktif bergerak maju bersama untuk menurunkan ketegangan dan mempromosikan diplomasi dan stabilitas regional*¹⁵.

3. ASEAN-U.S Summit

Kemitraan Strategis ASEAN–Amerika Serikat yang dibentuk pada 2013 sampai 2015 adalah salah satu dari bentuk kerjasama antara kedua pihak ini secara lebih dalam. Pertemuan pertama forum ASEAN–U.S Summit ini adalah pada tahun 2013 di Brunei Darussalam. Amerika Serikat melalui kebijakan *Rebalancing in Asia* yang diusung oleh pemerintahan Obama, oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mewakili presiden mencoba meyakinkan para pemimpin ASEAN bahwa minat Amerika Serikat untuk terlibat dalam ASEAN akan terus tumbuh. Dalam sambutan pembukaannya, Kerry mengatakan;

"Kemitraan yang kami bagikan dengan ASEAN tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Obama, dan memperkuat hubungan itu pada masalah keamanan, masalah ekonomi, dan lebih banyak lagi, adalah bagian penting dari penyeimbangan kembali Presiden Obama ke Asia. Penyeimbangan itu adalah komitmen, itu ada di sana untuk tetap tinggal, dan akan berlanjut ke masa de-

¹⁵ Asean Summit: Obama concerned over South China Sea row, The Star Online, on 8 September 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=rbIRYkFQzxM>, minutes 00:1:18.

pan." (Chalermpalanupap, 2014, pp. 60-61).

Dalam dialog dan pertemuan para pejabat pertahanan ASEAN dengan diplomat Amerika, muncul desakan terhadap ASEAN untuk bergerak maju dengan CoC dan bahkan memberikan beberapa masukan pada ketentuan yang mungkin dimasukkan (ICG, 2012). Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sekali lagi memberikan dukungan upaya ASEAN untuk membangun konsensus mengenai mekanisme berbasis prinsip untuk mengelola dan mencegah perselisihan. Pernyataan itu mengutip Insiden Scarborough dan menyesalkan penggunaan hambatan untuk menolak akses yang dilakukan China terhadap Filipina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mendesak semua penuntut untuk mengeksplorasi pengaturan kerjasama baru untuk mengelola eksploitasi sumber daya yang bertanggung jawab di Laut China Selatan (Simon S. W., 2012, p. 1009).

Hal ini semakin didukung dengan adanya rancangan kebijakan Amerika Serikat oleh Presiden Obama yang kala itu memutuskan untuk memfokuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada penguatan eksistensinya dikawasan Asia. Melalui kebijakan luar negeri –salah satunya– Pivot to Asia, dimana Amerika Serikat berupaya mempererat kerjasama dengan negara-negara dikawasan tersebut lewat aspek-aspek seperti; politik, militer, dan ekonomi. Kekuatan Amerika Serikat

yang juga sedang bergeser ke Asia kemudian memberikan pengaruh terhadap progres diplomasi yang ada. Sehubungan dengan sengketa Laut China Selatan, Washington telah menjadi pendukung kuat dari posisi negosiasi multilateral ASEAN. Seruan perluasan dialog untuk memasukkan tantangan strategis dan keamanan oleh Presiden Barack Obama juga mendorong semua pihak sengketa maupun pengambil keputusan untuk mempercepat upaya dalam menyepakati kesepakatan CoC secara lengkap bagi Laut China Selatan (Simon S. W., 2012).

Pada pertemuan ASEAN-US Summit 16 Februari 2016 yang berlangsung di Sunnylands, California, Obama menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan terus membangun hubungan dengan negara sekutu dan mitra kerjasamanya di kawasan Asia dan membantu meningkatkan kekuatan maritime mereka. Presiden Obama dalam pidato konferensi ASEAN-US Summit ini juga mengatakan bahwa;

“Berkaitan dengan keamanan, Amerika Serikat dan ASEAN menegaskan kembali komitmen kuat kami untuk tatanan regional di mana aturan dan norma internasional, dan hak semua bangsa untuk ditegakkan. Kami membahas kebutuhan untuk langkah nyata di Laut China Selatan untuk menurunkan ketegangan, termasuk penghentian reklamas lebih lanjut, konstruksi baru, dan militerisasi wilayah yang disengketakan.

Kebebasan navigasi harus ditegakkan dan proses perdagangan tidak boleh ter-

hambat. Saya menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan, dan kami akan mendukung hak semua negara untuk melakukan hal yang sama.”¹⁶

Dalam pertemuan lanjutan yang dilakukan pada September 2016 bertempat di Vientiane, Laos, Obama menyatakan berkenaan dengan isu keamanan, Amerika Serikat kembali berkomitmen dalam tatanan regional dimana aturan dan norma internasional ditegakkan dan perselisihan diselesaikan dengan damai. Hal ini disinggung Obama mengingat adanya pembicaraan perihal upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang masih belum menemui titik terang. Selain itu, dalam pidatonya Obama juga mengatakan bahwa;

“Ada pengakuan tentang pentingnya putusan arbitrase internasional pada bulan Juli lalu, yang legal dan mengikat, dan yang mengklarifikasi klaim maritim oleh Filipina dan China di Laut China Selatan. Kami membahas pentingnya penuntut yang mengikuti langkah-langkah yang telah mereka sepakati, termasuk menghormati hukum internasional, tidak melakukan militerisasi wilayah yang disengketakan dan tidak menduduki pulau-pulau yang tidak berpenghuni, terumbu karang dan beting. Dan saya tegaskan

¹⁶ President Obama at U.S.-ASEAN Leaders Summit Press Conference, U.S Department of State, on 16 February 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=d-jAuixx5mA> , minutes 4-5.

bahwa Amerika Serikat akan berdiri dengan sekutu dan mitra dalam menunjang kepentingan-kepentingan mendasar, di antaranya kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan yang sah yang tidak terhambat, dan penyelesaian sengketa secara damai.” (U.S. Mission to ASEAN, 2016).

Selain itu, Obama juga menekankan bahwa Amerika Serikat siap membantu untuk menciptakan perdamaian di Laut China Selatan. Dengan syarat, adanya permintaan khusus kepada pihak Amerika Serikat untuk melakukan hal tersebut. Obama mengatakan, bahwa pihaknya selalu menantikan kesempatan untuk berdiskusi tentang langkah maju untuk mereduksi tensi di kawasan sengketa melalui jalan diplomasi untuk kemudian mampu menciptakan wilayah yang di inginkan (Tuwo, 2016).

Selain kebijakan dipomasi politik yang dibangun Amerika Serikat dengan ASEAN dan forum-forum internasional di dalamnya, kebijakan melalui diplomasi keamanan juga dilakukan pemerintahan Obama terkait isu sengketa Laut CChina Selatan ini.

B. Diplomasi Keamanan

Diplomasi keamanan pada dasarnya mengacu pada upaya dalam membangun kemitraan melalui penggunaan program terkait keamanan, dan tidak menggunakan ancaman kekuatan terhadap mitra kerjasama. Diplomasi keamanan juga merupakan mekanisme untuk mengumpulkan dan memantau negara-negara sekutu dalam sebuah pendekatan

diplomatik¹⁷. Selain itu diplomasi ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan melindungi setiap bagian dari negaranya. Umumnya diplomasi keamanan akan berlangsung dalam berbagai bentuk kerjasama dibidang keamanan dan melibatkan instrumen militer, misalnya mencangkup; revitalisasi kerjasama militer, keamanan teritorial, isu keamanan maritime, bantuan persenjataan, serta beberapa kegiatan militer, seperti agenda latihan pasukan dan lain sebagainya.

Dalam melakukan kebijakannya, diplomasi keamanan yang dilakukan Obama melibatkan Amerika Serikat dalam hubungan kerjasama bilateral dengan negara-negara pengklaim di kawasan Laut China Selatan, yakni Filipina dan Vietnam.

a. Filipina

Filipina adalah mitra kerjasama bilateral yang menyeret Amerika Serikat ke dalam putaran sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Seperti yang telah penulis tuliskan pada bab sebelumnya, perihal adanya perjanjian lama antara Filipina dan Amerika Serikat yang telah disepakati sejak tahun 1951. Komitmen perjanjian inilah yang kemudian membuat Amerika Serikat dan Filipina secara berkelanjutan melakukan hubungan bilateral dalam aspek keamanan. Secara berkala Amerika Serikat dan Filipina melakukan pelatihan pasukan bersama dalam kegiatan yang dinamai VFA.

Namun, Washington dan Manila kemudian memperbaharui kerjasama dalam aspek keamanan pa-

¹⁷ D. Kron, Nicholas. 2015. "Security Diplomacy: Beyond Defense". Tesis. John Hopkins University for the degree of Master of Arts in Global Security Studies, hal. 29.

da 28 April 2014. Ditandatangani oleh Sekretaris Filipina saat itu, serta duta besar Amerika Serikat untuk Filipina saat itu, kerjasama bilateral ini dinamai *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA). Penandatanganan perjanjian ini pula ditujukan untuk menekan China selaku negara pengklaim yang selalu bertindak agresif di kawasan. Point terpenting dari EDCA ialah dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini akan sama dengan kehadiran pasukan militer Amerika Serikat yang bersifat rotasional. Sehingga diharapkan dapat memperkuat penentuan klaim Filipina atas klaimnya di kawasan Laut China Selatan, maupun menguatkan tekad dan kredibilitas Amerika Serikat dalam mendukung dan menghormati pertahanan komitmen Filipina (Castro, 2016).

Secara mendasar EDCA bukanlah perjanjian baru, namun pembaruan atau versi terbaru dari VFA sebelumnya. Perjanjian ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang digunakan oleh Filipina maupun Amerika Serikat dalam mengembangkan kapabilitas pertahanan individu maupun secara kolektif. Tujuan dari perjanjian ini lebih kepada tercapainya pengerahan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan milik Filipina.

Dalam perjalanan menuju peretivikasian EDCA, Filipina yang pada masa itu dipimpin oleh Benigno Aquino III memiliki kekhawatiran tentang keamanan maritim Filipina, dan keberadaan China di kawasan sengketa. Untuk memenuhi peningkatan keamanan eksternal selama masa jabatannya, Manila secara umum menerapkan strategi yang terdiri dari tiga bagian, yakni; pertama, keseimbangan internal meliputi upaya meningkatkan belanja militer, mengejar program modernisasi pertahanan, dan menggeser prioritas AFP. Kedua, penggunaan strategi diplomatik-hukum, dimana yang menjadi pusat per-

hatian Filipina dalam hal ini ialah terhadap tindakan Tiongkok di Laut China Selatan, dan ketiga, strategi Filipina adalah kerja sama keamanan dengan negara aliansinya, yang mana pada poin ini Amerika Serikat merupakan salah satu dari yang dimaksudkan (Greitens, 2016, pp. 1-2).

Adanya pergeseran pandangan China terhadap Amerika Serikat yang semula dalam peluang ekonomi menjadi pesaing keamanan, membuat Filipina menganggap bahwa Amerika Serikat kemudian mampu menjadi mitra kuncinya untuk melawan tekanan dan ekspansionisme dari China. Mengingat keterbatasan Filipina dalam hal menyamai pembelanjaan pertahanan China yang meningkat, para analis Filipina pada umumnya melihat penguatan aliansi adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Sehingga Filipina kemudian menetapkan kebijakan bagi perluasan hubungan keamanan sebagai metode terbaik untuk membela kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Pada tahun 2011 Amerika Serikat dan Filipina kemudian mulai membentuk dialog bilateral yang saat itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton sebagai perwakilan Amerika Serikat. Meski dalam perundingan kedua negara yang memakan waktu selama kurang lebih tiga tahun, penandatanganan perjanjian kerjasama EDCA akhirnya disepakati pada 2014 bertepatan dengan hadirnya presiden Barack Obama dalam pertemuan yang bertempat di Manila (Greitens, 2016, p. 2).

Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi dasar bagi pertimbangan Filipina dalam menentukan keputusan akhirnya. Diantaranya adalah; keprihatinan lama tentang neokolonialisme Amerika dan potensi kekuatan Amerika — terutama kekuatan militer Amerika yang bermanifestasi dalam bentuk pangkalan di tanah Filipina — untuk melanggar ked-

aulatan Filipina, adanya daya tarik hubungan ekonomi dengan China, dan khususnya China sebagai sumber potensial investasi dan infrastruktur, serta arti penting dari tantangan keamanan domestik. Poin ketiga dalam pertimbangan Filipina juga didasari oleh adanya ketidakamanan secara terus-menerus di beberapa wilayah Filipina karena kombinasi pemberontakan, terorisme, dan kekerasan kriminal lainnya, termasuk adanya laporan terkait kegiatan ISIS di Mindanao. Ini jelas menjadikan Filipina sebagai negara dengan tingkat keamanan internal yang cukup memprihatikan, berbeda dengan negara-negara aliansi Amerika Serikat di kawasan Asia yang lainnya (Greitens, 2016, pp. 2-3).

Namun, perjanjian kerjasama nyatanya tetap berjalan karena terlepas dari beberapa pertimbangan tersebut, Filipina dapat melihat peluang besar dari terbangunnya aliansi ini. Prinsip kerjasama yang pragmatis cukup membuat Filipina bersedia mengambil langkah besar. Karena dari sudut pandang EDCA pun, Filipina akan sangat diuntungkan dalam segi pengadaan senjata, dan banyak hal. Meski begitu, perjanjian kerjasama EDCA ini disepakati Amerika Serikat dan Filipina hanya akan berjalan dalam kurun waktu terbilang cukup singkat, yakni terhitung sejak 2014 dimana penandatanganan dilakukan sampai pada tahun 2016. Keberlangsungan perpanjangan kerjasama nantinya akan bergantung pada kepemimpinan baru kedua negara, karena pada tahun 2016 Filipina melakukan pemilihan untuk pemimpin yang baru, sehingga berbagai kemungkinan bisa saja terjadi.

Terlepas dari kondisi Filipina, keputusan disepakatinya EDCA didukung oleh kekhawatiran yang dirasakan Amerika Serikat tentang perilaku tegas China di kawasan sengketa, terkesan semakin agresif dan mendominasi negara pengklaim lainnya. Selain itu

pertimbangan para pembuat kebijakan Amerika Serikat yang mempertimbangkan sejarah hubungan Washington dan Manila dimasa lalu, status negara yang pernah menjadi bekas koloni Amerika Serikat ini merupakan negara terbesar ke-12 di dunia negara berdasarkan populasinya, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, serta posisinya pada titik yang menguntungkan di Samudera Pasifik secara strategis dan ekonomis juga penting bagi Amerika Serikat. Sehingga, Filipina dipandang sebagai penentu arah strategis untuk Asia-Pasifik dan mitra kunci dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri Amerika di wilayah tersebut (Greitens, 2016, p. 2).

EDCA sendiri merupakan bentuk bantuan Amerika Serikat dalam hal konstruksi fasilitas vital, peningkatan infrastruktur, penyiapan dan penyimpanan peralatan, serta pelatihan bersama yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi Filipina. Sebagai tambahan dalam pelaksanaannya, presiden Obama juga telah mencadangkan dana sebesar 50 juta US\$ yang bersumber dari Kongres sebagai dana *Maritime Security Initiative in Southeast Asia*, dengan dana tahun pertama akan diperuntukkan bagi program pengembangan AFP. Tujuan dari dijalkannya rancangan ini ialah akan ada alokasi untuk pembelian peralatan yang nantinya akan digunakan dalam pemantauan kegiatan dan pergerakan di Laut China Selatan (Castro, 2016).

Selain kepada Filipina, pemerintahan Obama juga melakukan hubungan bilateral bersama dengan negara ASEAN pengklaim lainnya yaitu, Vietnam. Intensitas interaksi diplomatik antara Amerika Serikat dan Vietnam sendiri mencapai puncak pada tahun 2010 dengan banyaknya keterlibatan orang-orang pemerintahan Obama dalam pembicaraan bilateral maupun multilateral yang melibatkan Vietnam juga di

dalamnya. Dalam salah satu kunjungannya Menteri Hillary Clinton menyimpulkan sebuah penekanan bahwa pemerintahan Obama telah menyiapkan hubungan yang lebih serius kedepannya dengan Vietnam (Manyin, 2012, pp. 5-6).

b. Vietnam

Di tahun 2010 Washington dan Hanoi melaksanakan *Defense Policy Dialogue* yang membahas tentang politik, keamanan, dan masalah pertahanan dalam forum yang dijalankan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri Vietnam serta pejabat militer kedua negara setelah sebelumnya juga telah menandatangani kerjasama militer *Statement of Intent on Military Medical Cooperation* di Hanoi. Tanda-tanda lain dari hubungan militer keduanya meliputi; keterlibatan angkatan laut Amerika Serikat dan Vietnam dalam pelatihan noncombat (dalam hal ini terkait kontrol kerusakan, latihan penyelamatan, dan lain-lain) yang dilaksanakan di kapal USS John S. McCain pada 2010 dan 2011, galangan kapal Vietnam yang memperbaiki dua kapal milik Komando Sealift militer Amerika Serikat pada 2010, serta ditahun 2011 Kementerian Pertahan Vietnam untuk pertamakalinya mengirim pasukannya ke perguruan tinggi staf Amerika Serikat dan lembaga militer lainnya (Manyin, 2012, p. 20).

Pertemuan antara Amerika Serikat dan Vietnam juga dilakukan pada Juli 2013, dimana Presiden Truong Tan Sang bertemu langsung dengan Presiden Obama di White House, Washington. Dalam kunjungan presiden Vietnam ini, kedua pimpinan negara membahas tentang perkembangan kerjasama bilateral keduanya. Dimana kedua negara menyatakan berkomitmen dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, menjunjung prinsip penyelesaian sengketa secara damai dengan mendukung penuh adanya

hukum internasional, maupun deklarasi DoC dan CoC (The White House President Barack Obama, 2013).

Setelah kunjungan presiden Vietnam pada 2013, Obama kemudian memenuhi undangan Presiden Republik Sosialis Vietnam Tran Dai Quang dalam sebuah pertemuan Comprehensive Partnership kedua negara. Pada pertemuan bulan Mei 2016 ini, Amerika Serikat dan Vietnam menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap penyelesaian damai dari sengketa wilayah dan maritim, termasuk penghormatan penuh terhadap proses diplomatik dan hukum, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk UNCLOS.

Kedua negara juga menggarisbawahi komitmen para pihak pengklaim untuk menahan diri dari tindakan yang memperburuk atau memperluas perselisihan dan mengakui pentingnya menerapkan DOC dan mempercepat negosiasi dengan hasil-hasil substantif menuju kesimpulan awal dari COC. Dalam hal ini, kedua negara menyatakan keprihatinan serius atas perkembangan terakhir di kawasan sengketa yang telah menyebabkan ketegangan, mengikis kepercayaan dan mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. Baik Amerika Serikat dan Vietnam membenarkan pentingnya menegakkan kebebasan navigasi dan perdagangan yang sah dan tanpa hambatan di Laut China Selatan, serta menekankan tindakan non-militerisasi (The White House President Barack Obama, 2016).

Bentuk lain kebijakan yang pernah Obama berikan kepada Vietnam adalah berupa pencabutan sanksi embargo senjata yang sebelumnya juga pernah dihapuskan dengan tenggang waktu oleh mantan presiden Bill Clinton. Namun pada 2016 dibawah

pemerintahan Obama, Amerika Serikat akhirnya mencabut sanksi yang embargo senjata terhadap Vietnam secara penuh. Dengan dicabutnya sanksi embargo senjata ini, Vietnam yang awalnya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan suplay senjata akhirnya dapat membuka pintu kembali. Sulitnya pengadaan senjata yang dialami Vietnam selama mendapat sanksi embargo begitu terasa bagi pasukan militer Vietnam sendiri. Kondisi senjata yang didapatkanpun terkadang tidak lagi memadai senjata yang bisa didapatkan negara lain. Dalam artian lain, senjata yang Vietnam dapatkan masuk dalam kategori senjata *old style*, yang mana ketika pasukan negara lain telah menggunakan senjata semacam itu dan berganti pada inovasi baru, pasukan Vietnam setidaknya baru mengantongi senjata-senjata tersebut.

Hal inilah yang dirasa perlu ditindaki oleh Obama. Kurangnya suplay senjata jelas akan berpengaruh pada tingkat keamanan dan upaya pengamanan itu sendiri. Pasukan yang ditempatkan di daerah perbatasan kawasan sengketa jelas tidak akan mampu mengambil tindakan yang lebih jauh jika tidak didukung pula dengan pengadaan senjata yang memadai. Sehingga dengan adanya pencabutan sanksi embargo ini, pasukan Vietnam diharapkan dapat lebih berkembang dan mampu mempertahankan kawasannya.

Tabel 4. 1 Kebijakan Amerika Serikat era kepemimpinan Bill Clinton vs Obama

Negara	Era Kepemimpinan	
	Bill Clinton	Barack Obama
Filipina	Merevitalisasi perjanjian bilateral dalam isu keamanan VFA (<i>Visiting Forces Agreement</i>)	Membentuk EDCA (<i>Enhanced Defense Cooperation Agreement</i>) sebagai lanjutan dari VFA
Vietnam	Membuka hubungan kerjasama pertamakali dengan Vietnam, menghapuskan sanksi embargo terhadap Vietnam dengan senggang waktu.	Secara keseluruhan permanen menghapuskan sanksi embargo senjata terhadap Vietnam, dan menjalin hubungan bilateral yang terus berkelanjutan.

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

Secara keseluruhan, upaya kerjasama yang dibangun oleh Obama dalam kebijakan terhadap sengketa Laut China Selatan ini nyatanya banyak mengadopsi kebijakan yang serupa dengan masa jabatan Clinton dan Bush. Dimana seperti yang tertera pada table 4.1, dapat dilihat bahwa bentuk kebijakan kerjasama yang Obama lakukan terhadap Filipina maupun Vietnam memiliki garis singgung yang berputar pada pola Clinton. Dalam artian, kebijakan kerjasama yang Obama lakukan merupakan adopsi kebijakan yang telah Clinton ambil sebelumnya, hanya saja pada masa jabatan Obama bentuk kebijakan kerjasama ini mengalami perkembangan dan telah mengalami modifikasi.

Namun begitu, kebijakan yang Obama lakukan terhadap Filipina dan Vietnam tidak menunjukkan adanya arah kemiripan secara keseluruhan ataupun adopsi kebijakan dari presiden sebelumnya yaitu, George W. Bush. Adanya *Joint U.S. Military Advisory Group* (JUSMAG) yang dibentuk oleh Bush sebelumnya pada masa Obama dilanjutkan sebagaimana kelangsungan kerjasama bilateral pada umumnya. Penempatan pasukan yang dilakukan oleh Obama didasari oleh upaya perbaikan kondisi terhadap negara sekutu, ini jelas berbeda saat Bush berusaha menempatkan pasukan di kawasan Laut China Selatan sebagai salah satu bentuk penekanan terhadap China lewat JUSMAG. *Defense Policy Dialogue* juga merupakan upaya perundingan yang dilakukan Obama melalui pemberdayaan pasukan melalui pelatihan, bukan secara terang-terangan memberikan pengaruh *hard diplomacy* terhadap negara sekutu.

Secara garis besar, perbedaan yang mencolok antara era Bush dan Obama adalah bentuk tindakan yang memiliki arah tujuan berbeda. Seperti yang terjadi di Filipina, Bush lebih memperhatikan permasalahan terorisme dan tindakan yang harus dilakukan seperti pada kelompok separatis islam disana. Sehingga Bush bermaksud untuk memperkuat kekuatan Filipina melalui perlawanan menghadapi teroris dan juga menunjukkan kekuatannya terhadap ancaman Asia baru, yakni China. Sedangkan Obama menjadikan pendekatannya dengan Filipina dalam agenda pembahasan Laut China Selatan juga bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama dengan negara yang menjalin hubungan bilateral dangannya ini, yaitu mendapatkan hasil akhir dari sengketa. Penyelesaian sengketa dan pemulihan kawasan menjadi target Obama. Ini jelas berbeda dengan Bush yang lebih emmentingkan per-tahan eksistensi kekuatan juga intervensi tersulubung

lewat penempatan pasukan Amerika Serikat di Filipina.

Keikutsertaan Amerika Serikat dalam memberikan solusi dan membangun kerjasama politik dengan forum regional ini menjadi bukti dari bentuk diplomasi politik yang dilakukan Amerika Serikat terhadap sengketa di Laut China Selatan. Penggabungan kemitraan yang telah Amerika Serikat lakukan bersama golongan atau organisasi tertentu dibuktikan dengan adanya kerjasama antara lain sebagai contohnya ialah ketergabungan perwakilan Washington dalam forum ASEAN-US Summit, *ASEAN Regional Forum*, dan ASEAN Summit, maupun hubungan antara Amerika Serikat dan ASEAN. Kerjasama ini juga didukung dengan adanya tujuan yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam meja forum, yakni dicapainya sebuah penyelesaian konflik dan perjanjian kesepakatan terkait sengketa yang dapat dikukuhkan sehingga setiap pihak dapat mendapatkan kepentingan negaranya.

Dalam setiap pembahasannya, Amerika Serikat juga senantiasa menekankan arah kebijakan penyelesaian konflik melalui perundingan bersama. Ini memperlihatkan sikap yang dilakukan Amerika Serikat dalam proses kebijakannya menggunakan metode *soft diplomacy* dan lebih mengutamakan suara forum sebagai bentuk dari upaya diplomasi politiknya. Opini Amerika Serikat yang berulang tentang dampak sengketa Laut China Selatan pun secara tidak langsung dapat membangun prespektif publik terhadap permasalahan ini. Dimana Amerika Serikat selalu mengaitkan permasalahan kawasan dengan kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan, sehingga mampu menggiring asumsi yang sama perihal dampak konflik yang belum selesai ini terhadap keberlangsungan isu yang dimaksud. Karenanya kemudian bukan

suatu hal yang mengherankan ketika China memberikan reaksi yang keras terhadap Amerika Serikat. Pandangan yang telah terbentuk karena seringnya opini ini di *mention* dalam sebuah forum menjadikannya sebagai isu yang juga dianggap serius oleh pihak lain. Ini membuktikan bahwa diplomasi politik yang dilakukan Amerika Serikat melalui forum internasional mampu memengaruhi persepsi sehingga berdampak pula pada tindakan maupun respon dari pihak-pihak lainnya.

Sementara itu perihal adanya keterkaitan diplomasi keamanan terhadap kebijakan Obama dalam sengekata di Laut China Selatan seperti yang sudah dituliskan diatas, telah nampak pada kebijakan Obama terhadap Filipina dan Vietnam sendiri. Jika secara garis besar diplomasi keamanan mencakup upaya dalam membangun program kemitraan melalui penggunaan program terkait keamanan dengan melibatkan instrumen militer di dalamnya, kebijakan Obama dalam hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan Filipina dalam perjanjian EDCA.

Seperti fungsinya sendiri, EDCA akan mencakup kerjasama Washington dan Manila terkait kerjasama militer, pengadaan alat, sampai pada penempatan pasukan militer. Hal ini sejalan dengan fokus bidang yang diamini oleh diplomasi keamanan yakni, revitalisasi kerjasama militer yang mana EDCA merupakan pembaharuan dari VFA, serta dilakukannya agenda pelatihan pasukan bersama, dan penempatan pasukan oleh Amerika Serikat di kawasan perbatasan klaim milik Filipina.

Hal ini serupa dengan agenda kerjasama *Defense Policy Dialogue* antara Amerika Serikat dengan Vietnam, dimana kedua negara ini melakukan ker-

jasama melalui diplomasi keamanan yang menghasilkan adanya pelatihan oleh Amerika Serikat terhadap pasukan Vietnam. Selain itu kebijakan penghapusan embargo yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Vietnam juga merupakan salah satu dari tujuan dari diplomasi keamanan antara dua negara ini, dimana dengan masuknya kembali suplay senjata, maka kebutuhan pertahanan militer dan kemanan Vietnam meningkat.

Adanya kerjasama hubungan kerjasama melalui diplomasi politik dan diplomasi keamanan ini kemudian juga membuktikan bahwa keterlibatan Amerika Serikat yang secara geografis mustahil dapat terlibat dalam konflik sengketa dapat diterima secara wajar. Selain itu, bentuk kebijakan yang dilakukan Obama pada dua kerjasama ini cenderung menunjukkan langkah keberlanjutan dan memiliki kemiripan bentuk kebijakan dengan yang pernah dilakukan oleh era kepemimpinan sebelumnya. Hal ini juga kemudian menimbulkan asumsi bahwa kesamaan partai penguasa pada setiap presiden memberikan faktor terhadap fokus dan arah kebijakan serta pola tindakannya.

Ini terbukti dengan adanya kemiripan dan keberlanjutan secara signifikan dari kebijakan yang Obama terapkan di Laut China Selatan dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh Bill Clinton sebelumnya. Kesamaan ini juga tidak hanya terlihat dari bentuk kebijakan, namun juga pola kebijakannya yang lebih memperlihatkan pada mempertahankan metode *soft diplomacy*. Pembangunan hubungan bilateral secara politik dalam aspek keamanan, membuka kerjasama bilateral, dan menjadi *partner* perundingan dengan kerjasama multilateral merupakan sebagian dari bukti bahwa kebijakan *soft diplomacy* yang dilakukan Obama dan Clinton memiliki kesamaan.

Terlepas daripada beberapa bagian kebijakan yang cenderung memiliki kemiripan ataupun perbedaan antara Obama dan dua presiden terdahulunya, kebijakan yang diupayakan Amerika Serikat terhadap sengketa di Laut China Selatan ini terbilang memiliki peningkatan eksistensi yang nyata dan berkelanjutan. Namun sayangnya, meski telah melalui beberapa upaya-upaya kebijakan yang telah dilakukan tersebut, *final* penyelesaian sengketa masih belum tercapai sampai hari ini. Bahkan cenderung memiliki instalasi konflik yang meningkat dan terkesan sulit menemui penyelesaian secara permanen.

